

POLITIK DAN PERDAGANGAN KOLONIAL BELANDA DI PONTIANAK

POLITICS AND TRADE DUTCH COLONIAL IN PONTIANAK

Hasanuddin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V Manado
e-mail: anwar_hasanuddin@yahoo.com

Naskah Diterima: 7 Maret 2016

Naskah Direvisi: 5 April 2016

Naskah Disetujui: 3 Mei 2016

Abstrak

Pontianak mendapat perhatian kolonial Belanda setelah Inggris melakukan perdagangan di Kalimantan Barat. Persaingan dagang antara Belanda dan Inggris membawa pengaruh bagi perdagangan di Pontianak. Kemajuan perdagangan menarik perhatian kolonial Belanda untuk menguasai Pontianak. Kolonial Belanda membatasi kekuasaan Sultan Pontianak melalui perjanjian-perjanjian membawa dampak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Eksploitasi kolonial Belanda melahirkan perubahan-perubahan baru dalam hubungan kekuasaan kongsi-kongsi Cina dan monopoli perdagangan di Pontianak. Kolonial Belanda semakin mempertegas kekuasaannya di Pontianak setelah Inggris mengesahkan James Brooke sebagai wakil pemerintahannya di Kalimantan Utara. Terdapat interelasi yang dinamis antara perubahan struktur politik dan ekonomi terhadap perubahan sosial masyarakat di Pontianak. Hubungan komunikasi melalui jaringan perdagangan antarpulau telah mendorong para pedagang sebagai komunitas baru membentuk dan mendirikan perkampungan suku bangsa di Pontianak. Hubungan yang dinamis antara Pontianak dengan daerah-daerah di Kalimantan Barat terutama Sambas, Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Matan, dan Sukadana telah membawa kemajuan politik dan ekonomi Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Residen Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sejarah, dengan menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagiannya dalam rangka memahami kebijakan politik dan perdagangan kolonial Belanda di Pontianak.

Kata Kunci: Pontianak, politik, perdagangan, kolonial Belanda.

Abstract

Pontianak had an attention of Dutch colonial after British trade in West Kalimantan. Trade competition between the Netherlands and the United Kingdom had an impact on trade in Pontianak. The progress attract the attention of Dutch colonial to master Pontianak. The Dutch Colonial control the power of the Sultan of Pontianak through agreements and bring the impact in the social, political, economic, and cultural. Dutch colonial exploitation brought changes in the power relations of chinese allied and the monopoly of trade in Pontianak. The Dutch colonial emphasized rule in Pontianak after United Kingdom endorses James Brooke as a representative government in North Kalimantan. There is a dynamic interrelation changes in political and economic that brought change social structures in Pontianak. The communication links through a network of inter-island trade has prompted traders as new communities formed and founded the settlement of ethnic groups in Pontianak. The dynamic relationship between Pontianak and West Kalimantan areas such as Sambas, Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Matan, and Sukadana has brought political and economic progress. And declared Pontianak as a center of commerce and government Resident West Kalimantan. This study uses the history of the literature by collecting historical data, describing an event into its parts in order to understand the political and trade policies of the colonial Dutch in Pontianak.

Keywords: Pontianak, trade, Dutch Colonial.

A. PENDAHULUAN

Pontianak merupakan sebuah wilayah kerajaan tradisional di Kalimantan Barat yang relatif sukses menyerap berbagai bentuk perjumpaan budaya dan kuasa dengan kawasan sekitarnya di Nusantara. Dalam dinamika sejarah Nusantara, Pontianak tampaknya tidak pernah sepenuhnya mengalami proses peminggiran yang membuatnya kehilangan peran dan identitas ketika *nation-state* Indonesia dibentuk oleh gelombang gerakan nasionalisme. Namun, sebagaimana juga telah dialami oleh banyak lokalitas di Nusantara bahwa masa VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dan Pemerintah Hindia Belanda telah membawa pengaruh dalam formasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Kalimantan Barat menjadi perhatian utama bagi Inggris untuk menguasai perdagangannya pada abad ke-17. Faktor ini menarik perhatian VOC melakukan perdagangan di Kalimantan Barat. Pontianak mendapat perhatian khusus VOC pada akhir abad ke-18, kemudian melakukan ekspansi melalui perjanjian atau kontrak dengan Pontianak pada tanggal 5 Juli 1779 (Veth, 1854: 260-262).

Pontianak mengalami kemajuan perdagangan setelah para pedagang Bugis, Melayu, Cina, Sanggau, Sukadana, Mempawah, dan Sambas ke Pontianak (Veth, 1854: 254-255). Letak Pontianak yang strategis berada di muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagai pintu gerbang ke daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Barat. Selain itu, berada di antara jalur perdagangan Selat Malaka dan merupakan daerah transit perdagangan baik dari timur maupun barat Nusantara, terutama Singapura sebagai pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka.

Hubungan antara kota dan daerah-daerah sekitar (*city periphery*) bagi Pontianak dengan Sambas, Sukadana, Sanggau, Mempawah, Landak dan daerah-daerah di Kalimantan Barat menempatkan Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan Keresidenan Borneo

West. Letak Pontianak diperkuat oleh pendapat Charles M. Cooley bahwa dalam hubungan lalu lintas perdagangan, pusat kerajaan yang terletak di muara atau di pertemuan sungai mengalami kemajuan di bidang perdagangannya (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984: 213).

Setelah Pemerintah Hindia Belanda menanamkan pengaruh politik dan ekonominya di Pontianak dan kemudian mengikat Sultan Pontianak dalam hubungan perjanjian tahun 1819, 1822 dan 1823 untuk menguasai Pontianak (Kartodirdjo *et al.*, 1973: 209-215). Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Pontianak sebagai vasal dengan mendapat keuntungan melalui bea, cukai dan monopoli perdagangan, serta hak politik untuk mengatur kekuasaan Pontianak.

Kegiatan perdagangan maritim mengalami problem ketika munculnya kegiatan para bajak laut atau perompak dari orang-orang Melayu dan Bugis yang telah bermukim di Pontianak (Kartodirdjo *et al.*, 1971: 134). Bajak laut disebut sebagai orang yang melakukan berbagai tindakan kekerasan di laut, tanpa mendapat wewenang dari pemerintah untuk melakukan tindakan perompakan (Lapian, 2011: 163).

Kemajuan perdagangan di Pontianak menjadikan persaingan dagang antara Inggris dan kolonial Belanda. Ketika masuknya pengaruh Inggris tahun 1811 di Pontianak, kemudian James Brooke menduduki Serawak tahun 1841, menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaannya di Pontianak (Lapian, 2012: 20-21).

Pontianak dan hubungannya dengan kolonial Belanda merupakan suatu rekonstruksi atau penggambaran bagaimana keterkaitan institusi politik kolonial Belanda dengan perdagangan di Pontianak yang mengalami perkembangan melalui proses sejarah.

Penulisan ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana hubungan politik Pontianak dengan kolonial Belanda, dan

bagaimana kebijakan politik kolonial Belanda khususnya perdagangan di Pontianak.

Kajian ini fokus pada periode masa kolonial Belanda, karena merupakan suatu masa penting dalam sejarah Indonesia. Proses ini menyebabkan terjadinya benturan di satu pihak antara lokalisme, regionalisme, dan nasionalisme, serta kolonialisme di pihak lain. Konteks inilah yang melandasi untuk menggambarkan kembali sejarah Pontianak pada masa kekuasaan kolonial Belanda. Beberapa sejarawan seperti Sartono Kartodirdjo (1984) menyatakan bahwa pada masa kolonial Belanda dan khususnya abad ke-19 merupakan periode pergolakan sosial, hal ini dapat dilihat pada disertasinya *The Peasants Revolt Banten in 1888* (Pemberontakan Petani Banten tahun 1888). Selain itu, A.B. Lopian (2011) dalam disertasinya tentang kawasan laut Sulawesi abad ke-19 berjudul *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, menyatakan bahwa dalam periode tersebut sangat erat kaitannya dengan keadaan sekarang. Hal itu disebabkan perluasan wilayah kekuasaan Hindia Belanda erat kaitannya dengan kondisi sekarang yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk otonominya sendiri. Demikian pula, Edward L. Poelingomang (2002) dalam disertasinya *Makassar Abad XIX, Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam menata perdagangan lebih berdasarkan prinsip-prinsip merkantilisme ketimbang ekonomi liberal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yaitu melalui beberapa tahap, pertama adalah mengumpulkan data-data sejarah (*heuristik*), dilakukan dengan proses menemukan sumber-sumber sejarah. Oleh karena periode penelitian ini mencakup masa kolonial

Belanda maka sumber primer berupa arsip-arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti arsip *Koloniaal Verslag* (KV), perjanjian atau kontrak dengan kolonial Belanda, serta surat kabar. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku hasil kajian tentang pelayaran dan perdagangan Pontianak didapatkan di perpustakaan.

Sumber-sumber primer yang telah dikumpulkan harus dikoreksi ulang, sebab titik tolak semua karya sejarah adalah mengenal penggunaan sumber primer maupun sekunder (Gottshalk, 1986: 35-40). Selain itu, landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditulis. Sumber itu dapat berupa arsip dan surat-surat pribadi. Bukti-bukti ini dipelajari kemudian dipertimbangkan, mana yang sesuai dengan pokok masalah (Frederick dan Soeroto, 1984: 13-14). Langkah ini dilaksanakan mengingat bahwa setiap keterangan tidak luput dari arti subjektif. Selanjutnya dilakukan kritik sumber baik otentitas atau keabsahan sumber sebagai kritik ekstern maupun kredibilitas sumber tersebut sebagai kritik intern (Kuntowijoyo, 1995: 100). Kemudian dilakukan interpretasi dengan merangkai, menghubungkan, dan menerangkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dapat menjadi sebuah historiografi (Kartodirdjo, 2014: 1-2).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Hubungan Pontianak dengan VOC dan EIC

Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Kalimantan Barat, setelah pedagang Inggris memberitakan tentang potensi ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 1611, Inggris membuka kantor dagangnya di Sukadana. Kegiatan perdagangan Inggris mendorong VOC terlibat dalam perdagangan di Kalimantan Barat. VOC mengadakan perdagangan lada dan intan di Landak. Pontianak menjadi perhatian VOC setelah pedagang Bugis, Melayu, dan Cina melakukan perdagangan.

Setiap tahunnya pedagang Cina dengan menggunakan jung menyinggahi Pontianak. Jung-jung Cina memuat kain, dan ketika mengangkut barang dagangan, utamanya emas (Heidhues, 2008: 37).

Posisi perdagangan yang dikuasai Sultan Pontianak, Syarif Abdurrahman membawa perkembangan politik dan ekonomi bagi Pontianak. Bea dan cukai yang dipungut Pangeran Laksamana sebagai syahbandar merupakan pendapatan (*revenue*) yang besar, sehingga secara ekonomis membawa kemajuan Pontianak.

Kemajuan perdagangan Pontianak mendorong Sultan Syarif Abdurrahman melakukan ekspansi terutama menguasai Sanggau. Pada 26 Maret 1778, atas bantuan VOC, Pontianak berhasil menguasai Sanggau. Hubungan Pontianak dengan VOC semakin kuat setelah Gubernur Jenderal VOC, Reinier de Klerk mengutus Willem Adrian Palm untuk melakukan hubungan perdagangan dan keamanan dengan Sultan Pontianak, sekaligus Palm diangkat sebagai perwakilan VOC di Pontianak. (Veth, 1854:260).

Pada 5 Juli 1779, VOC mengajukan kontrak pertama kali kepada Sultan Syarif Abdurrahman. Kontrak memuat kepentingan VOC dengan mengatur dan mengikat kerajaan melalui setiap pengangkatan sultan dan pembesar kerajaan lainnya harus sepengetahuannya. Sultan tidak diharuskan lagi menarik pajak, baik ekspor maupun impor, hak monopoli atas harga-harga komoditas perdagangan ditentukan oleh VOC, serta para pedagang Pontianak dan Sanggau harus memiliki pas atau surat izin berdagang. Begitu pula para pendatang Jawa, Melayu, Bali, Bugis, dan Cina yang ingin menetap di Pontianak dan Sanggau harus sepengetahuan VOC (Borneo-West 16/26, 5 Juli 1779; Veth, 1854: 260-262).

Campur tangan VOC dalam urusan intern kerajaan membawa Pontianak terlibat dalam pertikaian politik dan ekonomi antarkerajaan. Pada tahun 1784, Sultan Pontianak, Syarif Abdurrahman berusaha menaklukkan Mempawah dan meminta bantuan kepada VOC. Hal ini

disebabkan Mempawah dianggap sebagai salah satu faktor penghalang kemajuan perdagangan di Pontianak. Begitu pula konflik antara Pontianak dengan Sukadana yang disebabkan mengalirnya komoditas perdagangan dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukadana, sehingga pemasukan bea dan cukai semakin berkurang di Pontianak (Kartodirdjo, 1993: 284-285).

Permintaan Sultan Pontianak kemudian disetujui Residen Pontianak J.J Klagman. Langkah pertama adalah menyerang Sukadana. Kepentingan VOC ikut menyerang Sukadana, karena Sultan Sukadana tidak mengakui supremasi VOC, dan juga adanya intervensi VOC untuk menguasai perdagangan Sukadana dari kekuasaan Inggris. VOC kemudian mengirim armadanya bersama pasukan Pontianak dipimpin Syarif Kasim (putra sulung Sultan Pontianak) menyerang Sukadana. Pada tahun 1786, Pontianak bersama VOC berhasil menaklukkan Sukadana. Sultan Sukadana, Ahmad Kaharudin bersama kerabat kerajaan dan para pengikutnya berhasil melarikan diri, sehingga Sukadana jatuh dalam kekuasaan Pontianak (Veth, 1854: 273-274). Sultan dan kerabat Kerajaan Sukadana mengungsi ke daerah Kayung Matan (Kartodirdjo, 1993: 286).

Setelah jatuhnya kekuasaan Sukadana, mendorong kembali Sultan Pontianak menaklukkan Mempawah. Pada tahun 1787, pasukan Pontianak dipimpin Syarif Kasim dan dukungan tiga armada laut VOC dari Batavia menyerang Mempawah dan berhasil ditaklukkan. Syarif Kasim kemudian diangkat sebagai Panembahan Mempawah dengan daerah bawahan VOC (Veth, 1854: 274-277).

VOC mulai menegaskan pengaruhnya terhadap Pontianak karena jaringan perdagangan yang telah dilakukan Sultan Pontianak. Pontianak menjadi tempat persinggahan pedagang untuk mengangkut emas, lada, dan intan. Beberapa pedagang di antaranya dari Bugis, Melayu, dan Cina telah bermukim di Pontianak. Mereka menetap di daerah pesisir pantai dan muara

sungai. Sebagian besar pedagang bermukim di sepanjang Sungai Kapuas, Sungai Landak, dan daerah pesisir pantai sebagai kawasan perdagangan (Veth, 1854: xxxi).

Hubungan Pontianak dengan VOC telah membawa keuntungan bagi VOC, secara perlahan menggeser otoritas Sultan Pontianak dengan memperoleh kekuasaan politik dan penghasilan dari upeti serta laba perdagangan. Pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi yang berdampak pada krisis keuangannya. Pada tahun 1811, *East India Company* (EIC) atau Kompeni Dagang Inggris menggantikan VOC di Pontianak.

Sebelumnya, pada tahun 1808, J. Burn seorang kapten kapal dan pedagang Inggris menetap di Pontianak. Burn menjelaskan lebih lengkap tentang keadaan Pontianak dan daerah sekitarnya. Wilayahnya penuh dengan kekayaan alam, dan semuanya terdapat emas. Sejumlah besar emas dikelola oleh koloni orang Cina, dan setiap tahunnya diekspor sekitar setengah juta sterling. Laporan J. Burn menarik Thomas Stamford Raffles menguasai Pontianak. Kemudian Raffles mengirim surat kepada Sultan Pontianak, Syarif Kasim untuk memberikan informasi mengenai keadaan di Borneo Barat (Heidhues, 2008:36).

Munculnya bajak laut dipimpin Pangeran Anom dan Ilanun Abdul Rasyid menyebabkan perdagangan mengalami penurunan di Pontianak. Mereka sering merompak kapal-kapal yang masuk ke Pontianak. Pada 14 Februari 1811, Sultan Syarif Kasim menyurati Raffles dan meminta bantuan untuk mengatasi bajak laut tersebut. Raffles mengirim armada lautnya ke Pontianak dan berhasil menumpas para bajak laut. Setelah itu Pontianak mulai aman dan perdagangan kembali stabil. Tindakan Raffles membantu Sultan Pontianak untuk menanamkan pengaruhnya dan kepentingan perdagangan. Selain itu mengamankan pedagang Inggris yang sering mengalami perompakan di Pontianak (Gallop *et al.*, 1991: 132-134).

Pada tahun 1816, terjadi pergolakan kongsi-kongsi Cina yang menguasai tambang-tambang emas di wilayah Pontianak. Kongsi-kongsi Cina menolak diterapkannya penarikan bea dan cukai ekspor terutama emas. Hal ini disebabkan produksi tambang-tambang emas yang dikuasainya mulai menurun (Ricklefs, 2009: 306). Dalam menghadapi permasalahan kongsi Cina, terjadi pula peralihan kekuasaan antara EIC kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia.

2. Kebijakan Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda

Setelah kolonial Hindia Belanda kembali berkuasa di Nusantara, langkah-langkah yang diterapkan adalah merestrukturisasi hubungannya dengan penguasa lokal. Di Pontianak, pada 21 Juli 1818 berlangsung periode baru dalam hubungan Pontianak dengan kolonial Belanda. Kolonial Belanda mulai mendirikan kantor dan tangsi permanen, kemudian menyatakan kekuasaannya di Pontianak (Heidhues, 2008: 35).

Awal abad ke-19, Pontianak menjadi pintu gerbang bagi para pedagang pribumi, Eropa dan Cina. Aktivitas pedagang Cina berhubungan dengan usaha kongsi-kongsi Cina di Mandor dan Monterado. Setiap tahunnya lebih dari 15 jung Cina ke Pontianak. Jung Cina umumnya mengangkut buruh-buruh pertambangan yang ditempatkan pada kongsi Lanfang di Mandor. Mereka juga membawa berbagai komoditas barang dari Cina. Jung-jung Cina setelah berlabuh beberapa bulan di Pontianak, kembali berlayar ke Cina dengan memuat sejumlah besar emas. Selain dari Cina, terdapat dari Siam dengan jumlah yang kecil (Heidhues, 2008: 61).

Peraturan cukai bagi orang Cina bersama jung yang masuk ke pelabuhan Pontianak membayar pajak imigrasi sebesar satu gulden per orang, sedangkan orang Cina yang kembali ke Negeri Cina harus membayar pajak keluar sebesar lima belas gulden (Heidhues, 2008: 62).

Usaha kongsi Cina sebagai penghasil emas dan lada mendorong kolonial Belanda untuk menguasainya. Kolonial Belanda memerintahkan kepada kongsi-kongsi Cina untuk mengakui kekuasaannya. Namun, kongsi-kongsi Cina menolak dan tidak mengakui kekuasaan kolonial Belanda di Pontianak (Kartodirdjo *et al.*, 1971: 134).

Penangkapan orang-orang Cina akibat penyelundupan candu menimbulkan kemarahan kongsi Langfang di Mandor. Pada akhir tahun 1819, kongsi Lanfang di Mandor menyerang tangsi militer kolonial Belanda di Pontianak. Namun, penyerangan kongsi Lanfang kemudian berhasil ditumpas oleh militer kolonial Belanda (Veth, 1856: 80-81; Alqadrie, dkk., 1984: 71-72). Peristiwa penyerangan kongsi Lanfang membawa dampak bagi perdagangan karena hanya sedikit kapal dagang berlabuh di Pontianak (Veth, 1856: 428).

Dampak pemberontakan kongsi Lanfang di Mandor menyebabkan kolonial Belanda mengambil kebijakan untuk membubarkan perkongsian Langfang, serta menempatkan seluruh wilayahnya di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Setelah dihapuskannya kongsi Cina mengakibatkan orang-orang Cina kehilangan tempat berpijak. Mereka memilih migrasi ke Pontianak untuk membuka perdagangan (Vleming, 1926: 257).

Pada 12 Januari 1819, Pemerintah Hindia Belanda diwakili Komisaris Nahuys mengajukan perjanjian kepada Sultan Pontianak, di antaranya kekuasaan atas kerajaan dilaksanakan oleh Sultan Pontianak bersama kolonial Belanda; dan semua penghasilan dari Pontianak dibagi rata antara Sultan Pontianak dengan kolonial Belanda. Penghasilan pajak ekspor-impor penjualan candu, monopoli perdagangan garam, dan pajak orang Cina dikuasai oleh kolonial Belanda (Kartodirdjo *et al.*, 1973: 209; Alqadrie *et al.*, 1984: 37-39).

Kesepakatan perjanjian bagi kolonial Belanda dianggap sebagai legitimasi politiknya untuk mengatur

Kerajaan Pontianak dan orang-orang Cina, serta monopoli perdagangan garam dan candu di Pontianak.

Pada tahun 1819, Pangeran Syarif Usman dinobatkan menjadi Sultan Pontianak. Peralihan kekuasaan kerajaan merupakan jalan bagi kolonial Belanda untuk memperkecil kekuasaan Sultan Pontianak. Pada 16 Agustus 1819, kolonial Belanda kembali mengajukan perjanjian dengan Sultan Pontianak. Perjanjian memuat bahwa kolonial Belanda berhak menentukan calon sultan dan para pembesar kerajaan (Pasal 1). Pemasukan dari penyewa tanah, pajak, pajak perorangan, emas, intan, cukai barang ekspor, penjualan candu, pegadaian, dan monopoli garam dikuasai oleh kolonial Belanda (Pasal 6, 7). Pada pasal 12, Sultan Pontianak menyerahkan kewenangan orang-orang Cina dan Eropa kepada kolonial Belanda (Kartodirdjo *et al.*, 1973: 209-213).



Gambar 1. Sultan Pontianak bersama Residen dan Assiten Residen Pontianak menghadiri perayaan ulang tahun Kerajaan Pontianak.

Sumber: "Nomor Soeltan Pontianak", *Panji Pustaka*, No. 15 Tahun IV, 23 Februari 1926.

Kekuasaan Sultan Pontianak semakin dibatasi, dan berlakunya peraturan pajak (*belasting*) yang dibebankan penduduk dan penyerahan wajib (*verplichte leveranties*) pajak per kepala menyebabkan kehidupan penduduk semakin terbebani. Sultan Pontianak tidak pernah menarik pajak kepada penduduk, namun adanya perjanjian tersebut mengakibatkan penduduk harus menyetor pajaknya kepada petugas pajak (*collector*) bagi penduduk disebutnya "tukang cukai".

Walaupun orang-orang Cina berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, tetapi pedagang Cina menguasai perdagangan emas. Pada tahun 1822, produksi tambang emas hampir semuanya diangkut ke Negeri Cina. Sisanya dalam jumlah terbatas dibawa para pedagang Inggris melalui barter dengan candu, tekstil, dan besi. Produksi emas juga diangkut ke Jawa melalui pengangkutan perahu Bugis dan dijual tunai atau ditukarkan dengan minyak, tembakau, dan pakaian (Heidhues, 2008: 35).

Monopoli perdagangan yang diterapkan kolonial Belanda disebabkan persaingan dagangnya dengan Inggris. Kebijakan kolonial Belanda membawa dampak bagi perdagangan Inggris yang mengalami penurunan, terutama melalui publikasi 14 Februari 1824 tentang pelabuhan bebas. Kebijakan kolonial Belanda bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Inggris yang menguasai Singapura dan berkembang sebagai pelabuhan bebas tahun 1819 (Polinggomang, 2002: 60-61).

Pontianak sebagai pusat kegiatan perdagangan terutama keluar masuknya barang dagangan dilengkapi fasilitas perdagangan, di antaranya terdapat gudang-gudang berfungsi tempat penyimpanan barang (*pakhuis*). Dalam laporan keuangan Sultan Pontianak, 10 Juni 1820 tercantum bahwa Pangeran Bendahara Syarif Ahmad, telah menerima tarif pajak sebanyak 60 gudang dan setiap gudangnya dipungut 50 ringgit. Jumlah penghasilan pajak sewa gudang sebesar 3.000 ringgit diserahkan kepada Sultan Pontianak atas perintah Pemerintah Hindia Belanda (*Besluit* 18 Nopember 1820, No.19). Kebijakan tersebut diambil Pemerintah Hindia Belanda agar Pontianak dapat bersaing dengan Singapura.

Pada 16 Desember 1822, Pemerintah Hindia Belanda kembali mengikat Sultan Pontianak melalui perjanjian antara lain Sultan Pontianak tidak lagi mendapatkan sebagian dari penghasilan pajak dan bea cukai di pelabuhan, tetapi hanya diberikan

tunjangan *f* 42.000 setiap tahunnya (Pasal 1). Pada pasal 4, Sultan Pontianak diharuskan memerintahkan penduduk untuk menanam kopi, lada, kapas, dan produksi komoditas perdagangan lainnya (Kartodirdjo *et al.*, 1973: 213-214).

Perjanjian tersebut menggambarkan kolonial Belanda hanya perhatian pada pemasukan pajak, bea, dan cukai. Kewenangan Sultan Pontianak bersama kolonial Belanda atas pemasukan pajak dan bea dan cukai dibagi sama rata, kemudian diganti oleh kolonial Belanda yang hanya membayar kesetiaan Sultan Pontianak dengan pembayaran yang memadai dari hasil pajak yang dikumpulkan dari orang-orang Cina. Sebagai imbalannya Sultan Pontianak mendapat penghasilan sebesar *f* 42.000 setiap tahunnya. Pemerintah Hindia Belanda telah memperoleh kekuasaan untuk memungut cukai atas ekspor-impor, memberlakukan pajak kepala bagi orang Cina, menguasai hak-hak monopoli penjualan (*pacht*), terutama candu dan monopoli garam (Heidhues, 2008: 68).

Suasana perdagangan di Pontianak mengalami kemerosotan akibat penutupan kongsi Lanfang, dan pergolakan antara kongsi-kongsi Cina, sehingga pelabuhan Pontianak tidak banyak mendapat pemasukan bea dan cukai dari kapal dagang. Pada tahun 1823, kapal-kapal yang berlabuh di Pontianak mulai kembali normal (Veth, 1856: 428).

Demikian pula usaha Sultan Pontianak untuk meningkatkan kembali perdagangan di Pontianak dilakukan dengan mengirim surat tanggal 17 Januari 1826 kepada Gubernur Jenderal, Baron van Capellen di Batavia. Sultan Pontianak melaporkan masalah orang-orang Cina di Mandor, dan meminta bantuan van Capellen untuk membuka kembali kongsi-kongsi Cina di Mandor (Gallop *et al.*, 1991:134). Tujuan Sultan Pontianak agar kongsi-kongsi Cina dapat kembali menghasilkan emas dan lada, sehingga komoditas tersebut dapat mengalir ke Pontianak.

Pada tahun 1828, penjualan tembakau Jawa dan Cina menghasilkan keuntungan *f* 3.384 melalui pemungutan cukai *f* 1 per keranjang tembakau Jawa, *f* 5 per pikul tembakau Cina yang dibuat di Jawa, dan *f* 8 per pikul tembakau Cina murni. Selama tahun 1828 sekitar *f* 9.098,98 disetorkan kepada kas kolonial Belanda (Veth, 1871: 15-16).

Hasil cukai ekspor-impor selama tahun 1828 berjumlah *f* 42.333,41. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Faktor ini disebabkan adanya larangan bagi pengangkutan candu di mana setiap petinya dapat menghasilkan pemasukan cukai bagi kolonial Belanda (Veth, 1871:17).

Pada tahun 1833, Pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis keuangan, akibat penghasilan yang diterima di Kalimantan Barat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Pemerintah Hindia Belanda melalui Komisaris Kalimantan, Francis mengambil kebijakan untuk menyelesaikan krisis keuangannya dengan mengeluarkan Resolusi 18 Februari 1833 No. 39. Resolusi ini memuat 6 pasal yang tujuannya agar membatasi pengeluaran anggaran belanja. Mulai 1 Juni 1834, Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan pos-pos militernya di Pontianak dan Sambas, di luar dari kedua kota tersebut cukup didirikan pos-pos kecil (Veth, 1856: 135-136).

Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan peraturan tentang kebijakan tarif ekspor-impor pedagang pribumi dan asing di Pontianak. Setiap *kapal wankang* Cina dari Kanton berkapasitas muatan besar dipungut pajak 2.070 *ropijen*. Kapal jung Cina berkapasitas muatan kecil dipungut 1.270 *ropijen*, dan kapal jung dari Siam dipungut 800 *ropijen*. Selain itu, untuk barang komoditas dari Nusantara dibawa pedagang pribumi ke Pontianak dikenai pajak impor berdasarkan nilai barang. Barang candu setiap 1 peti berisi 40 (bentuknya sebesar bola) dipungut pajak 100 *ropijen*, 1 pikul timah/besi pajak 2 *ropijen*, 1 pikul lada pajak 4 *ropijen*, 1

pikul gambir pajak 1 *ropijen*, 1 pikul kapas/lumut laut pajak $\frac{1}{2}$ *ropijen*, 100 potong rotan hutan pajak 1 *ropijen*, 1 kati sarang burung putih jenis terbaik pajak 2 *ropijen*, 1 pikul sarang burung hitam pajak 20 *ropijen*, 1 pikul jenis kayu gaharu pajak 30 *ropijen*, 1 pikul gula putih pajak 1 *ropijen*, dan 1 pikul gula jawa $\frac{1}{2}$ *ropijen*. Untuk komoditas cengkeh, pala, bunga pala, dan kayu manis dipungut 6 *pet*, kain Jawa dan benang kain Jawa 4 *pet*, sedangkan semua komoditas Eropa tanpa membedakan jenis barang 6 *pet*, dan jenis komoditas yang tidak disebutkan di atas dipungut 6 *pet*. Komoditas yang dibebaskan pajaknya adalah garam, intan, emas, dan perak. Penghasilan keseluruhan tarif impor dari pedagang setiap tahunnya dibagi antara Sultan Pontianak dan Pemerintah Hindia Belanda (Veth, 1856: 43).

Kegiatan pedagang Inggris telah lama melakukan hubungan dagang dengan Pontianak. Komoditas wol dan kain yang dipasarkan pedagang Inggris sangat diminati di pasaran Pontianak. Kolonial Belanda mengambil tindakan untuk membatasi produk Inggris dari Singapura masuk ke Pontianak. Kemudian dikeluarkan kebijakan Resolusi 18 Februari 1833 tentang tarif ekspor-impor tinggi bagi komoditas wol, dan jenis kain lainnya. Setelah diberlakukannya Resolusi tersebut, para pedagang Inggris mulai jarang berdagang di Pontianak. Hasilnya barang dagang wol dan kain mulai langka di Pontianak, kondisi ini juga dialami hampir di seluruh Nusantara. Dalam usaha mengatasi kelangkaan wol dan kain, Gubernur Jenderal Joan Chretien Baud mengeluarkan Resolusi 14 Nopember 1834 tentang pembangunan pabrik tekstil di Batavia, Semarang, dan Surabaya.

Pada tahun 1850, terjadi perang kongsi-kongsi Cina di Monterado. Perang kongsi ini membawa dampak penuh kesengsaraan bagi orang-orang Cina. Sebagian besar orang-orang Cina mengungsi ke Pontianak, sehingga sejak saat itu penduduk Pontianak mulai menaruh

perhatian terhadap orang Cina dan adat istiadatnya. Kemudian kolonial Belanda mengambil kebijakan dengan membubarkan seluruh perkongsian Cina, serta menempatkan seluruh wilayahnya di bawah kekuasaan kolonial Belanda (Heidhues, 2008: 83-88).

Sebelum terjadi perang kongsi Cina, jalur perdagangan Pontianak – Sambas – Singapura merupakan jalur yang paling banyak diminati pedagang. Sebagian besar para pedagang mengangkut komoditas emas dan lada dipasarkan ke Singapura dan Batavia. Setelah penutupan kongsi-kongsi Cina oleh kolonial Belanda membawa dampak menurunnya perdagangan di Pontianak, Sambas, dan Singapura (Heidhues, 2008: 37).

Penutupan kongsi-kongsi Cina juga membawa dampak bagi para imigran dari Negeri Cina dilarang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Tahun 1856, kebijakan baru dikeluarkan kolonial Belanda mengizinkan masuknya imigran Cina dalam jumlah terbatas. Kolonial Belanda mulai menyadari bahwa para imigran Cina mempunyai pengaruh positif bukan saja kepada orang Dayak mengajarkan sistem pertanian yang baik, tetapi juga orang Cina berdagang secara lebih adil, daripada yang dilakukan oleh para pedagang Melayu, Bugis, dan Arab. Pada awal tahun 1856 dan Maret 1857, terdapat imigran Cina yang datang ke Pontianak sejumlah 169 jiwa. Tahun 1858, yang datang 123 imigran Cina, dan hampir semuanya memilih bermukim di Pontianak (Heidhues, 2008: 135).

Pada akhir abad ke-19, kegiatan perdagangan Pontianak mengalami kemajuan setelah berbagai komoditas perdagangan seperti emas, intan, kopra, karet, lada, dan sarang burung didatangkan dari daerah-daerah pedalaman atau hulu. Dinamisnya perdagangan Pontianak menarik para pedagang bukan hanya singgah di pelabuhan, tetapi juga menetap dan mengembangkannya menjadi perkampungan.



Gambar 2. Perkampungan pedagang, 1935
Sumber: KITLV-174776.

Sultan Pontianak menetapkan wilayah tersendiri bagi para pedagang untuk mendirikan permukiman. Sebagaimana dijelaskan Veth (1854: 17) bahwa para pedagang mendirikan permukiman di sekitar Sungai Kapuas dan sepanjang Sungai Kapuas Kecil yang letaknya paralel sebelah timur Keraton Kadriah sebagai pusat kerajaan. Tidak mengherankan di Pontianak banyak dijumpai perkampungan pedagang yang sesuai nama daerah asalnya, seperti Kampung Bugis, Tambelan, Banjar, Serasan, Sampit, Bangka, Belitung, Kuantan, Kamboja, Saigon, dan Bansir.

Dampak dari berbagai perkampungan pedagang telah memberi nuansa berkembangnya kehidupan sosial yang lebih multi-kultur. Sebagai gambaran, penduduk Pontianak berjumlah 20.989 jiwa, di antaranya 233 orang Eropa, 7.085 adalah orang Cina, dan 212 adalah orang Arab (Cabaton, 2015: 362). Begitu pula tahun 1826, banyak orang Bugis datang bermukim untuk berdagang. Mereka menunjukkan sikap yang patuh terhadap pungutan pajak-pajak. Mereka tidak peduli dan menganggapnya sebagai uang muka yang dapat mereka peroleh dari keuntungan perdagangannya dengan orang-orang Cina dan penduduk pedalaman (Veth, 1871: 18-19).

Komposisi penduduk Pontianak yang heterogen kemudian menjadi dinamis dalam kemajuan dan perluasan Pontianak. Demikian pula jaringan perdagangan Pontianak dengan daerah-daerah sekitarnya di Kalimantan Barat, seperti Sambas, Mempawah, Landak, Sanggau, Kubu,

Sintang Matan, dan Sukadana telah menempatkan Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Residen Kalimantan Barat.

3. Kebijakan Pelayaran Niaga

Peraturan perdagangan sangat menentukan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, dalam usahanya untuk menyukseskan eksploitasi, persaingan dagang dengan Inggris, dan kemajuan perdagangan dan pelabuhan Singapura.

Pemerintah Hindia Belanda menyadari Singapura dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi kekuasaannya. Pemerintah Hindia Belanda membuka beberapa pelabuhan untuk perdagangan internasional dan pelabuhan bebas. Pelabuhan Pontianak mulai dibangun pada tahun 1825, untuk mencegah mengalirnya komoditas perdagangan yang diangkut ke Singapura.

Kesuksesan Singapura tidak hanya memicu Pemerintah Hindia Belanda membuka pelayaran internasional, tapi juga pelabuhan bebas. Pada 1 Januari 1834, Pemerintah Hindia Belanda membuka pelabuhan bebas bagi Pontianak untuk dapat bersaing dengan Singapura (Dick, 1988: 406-407). Perdagangan di pelabuhan tidak dikenakan bea cukai, kecuali bea pelabuhan (Kartodirdjo *et al.*, 1971: 38).

Pelabuhan Pontianak kembali dikunjungi para pedagang, namun setelah kolonial Belanda menerapkan peraturan pelayaran niaga yang ketat, serta pajak ekspor dan impor yang tinggi mengakibatkan pelabuhan Pontianak hanya sekadar sebagai pos-pos depan saja. Kebijakan pelabuhan bebas tidak bertujuan untuk menjadikan Pontianak sebagai pesaing Singapura, melainkan upaya untuk menyelamatkan kepentingan politiknya.

Setelah Inggris memperluas pengaruh politiknya di Brunei dan Serawak, James Brooke diangkat menjadi Gubernur Serawak oleh Sultan Brunei pada tahun 1841. Kemudian tahun 1845, Pemerintah Inggris di Singapura mengesahkan James Brooke sebagai wakil pemerintahannya di Kalimantan Utara. Kondisi ini menyebabkan kolonial Belanda

semakin memperkuat kekuasaannya di Pontianak agar dapat mencegah masuknya pengaruh Eropa di Pontianak (Kartodirdjo *et al.*, 1973: 162-165).

Pada tahun 1849, kolonial Belanda mengganti sebutan Keresidenan Pantai Barat Borneo dengan ibu kota Pontianak menjadi Keresidenan Borneo Barat (*wester-afdeeling van Borneo*) untuk menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial Belanda tidak terbatas pada wilayah pantai saja, walaupun pejabat kolonial Belanda sangat jarang masuk ke daerah pedalaman Pontianak (Lapian, 2012: 21).

Setelah tiga belas tahun kebijakan pelabuhan bebas diberlakukan, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 32 tanggal 27 April 1847 tentang peraturan pelaksanaan pendataan kapal dan perahu yang berlabuh dan bertolak di pelabuhan, batas wilayah pelabuhan, kegiatan ekspor-impor, dan pelayaran niaga (Poelinggomang, 2002: 79).

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan bagi jenis kapal atau perahu layar pedagang pribumi diwajibkan untuk memiliki dokumen surat izin berlayar tahunan (*jaarpas*). Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol pelayaran pribumi dan mencegah tindakan perompakan terhadap kapal-kapal Belanda dan Eropa (Sulistiyono, 2012: 103).

Wangkang-wangkang Cina menjadi pasar yang menguntungkan atas barang-barang yang dibawa dan kembali mengangkut muatan penuh, *wangkang* menjadi dasar perdagangan di Pontianak. Perdagangan mengalami kemajuan setelah perahu-perahu dari Brunei kembali mengangkut kamper, sarang burung, dan barang-barang lain yang disukai oleh orang Cina (Veth, 1871: 19).

Dibukanya Pontianak sebagai pelabuhan bebas menarik para pedagang pribumi dan asing keluar masuk pelabuhan Pontianak. Hubungan perdagangan antara Pontianak dan Sambas, pada tahun 1843 tercatat 32 kapal yang masuk dari Sambas dengan muatan 592 ton, dan keluar menuju Sambas tercatat 47 kapal dengan muatan 530 ton. Tahun 1847 terjadi peningkatan sebanyak 39 kapal dengan muatan 364 ton yang masuk, dan keluar tercatat 33 kapal dengan muatan 386 ton.

Tahun 1850 terjadi peningkatan kapal masuk dan muatan dengan jumlah 69 kapal dan memuat 925 ton, dan keluar sebanyak 59 kapal dan memuat 485 ton (Veth, 1854: 30).

Demikian pula kapal dari Sukadana yang berlabuh di Pontianak tahun 1843 tercatat 9 kapal dengan muatan 31 ton, dan keluar menuju Sukadana tercatat 8 kapal dengan muatan 21 ton. Tahun 1847 terjadi peningkatan berjumlah 25 kapal dengan muatan 139 ton, keluar sebanyak 18 kapal dengan muatan 103 ton. Tahun 1850 terjadi peningkatan dengan jumlah 31 kapal dan memuat 92 ton, dan keluar berjumlah 15 kapal dan memuat 28 ton barang (Veth, 1854: 94).

Kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Pontianak tahun 1843 tercatat 16 kapal dengan muatan 1.561,5 ton, dan keluar tercatat 19 kapal dengan muatan 1.888,5 ton. Tahun 1847 terjadi peningkatan dengan 24 kapal memuat 2.125 ton, dan keluar tercatat 20 kapal memuat 2.038,5 ton. Tahun 1850 tercatat 16 kapal dan memuat 1.580 ton dan keluar tercatat 18 kapal dan memuat 1.624 ton (Veth, 1854: 20).

Keluar masuknya kapal pedagang pribumi dan asing memberi kontribusi bagi pemasukan pajak ekspor-impor melalui tarif barang dan tarif pajak mengalami pasang surut. Tahun 1843 jumlah pajak ekspor-impor sebesar f 1.118.568, tahun 1844 mengalami peningkatan sebesar f 1.279.820, tahun 1845 mengalami penurunan sebesar f 1.148.086, dan mengalami peningkatan tahun 1846 sebesar f 1.669.730, dan tahun 1847 sebesar f 2.041.046 (Veth, 1854: 20-21).



Gambar 3. Bongkar muat barang di pelabuhan Pontianak, 1915.
Sumber: KITLV-75665.

Hegemoni politik Pemerintah Hindia Belanda menjadi dasar yang kokoh dalam mempertahankan monopoli perdagangan. Keuntungan perdagangan dihasilkan melalui

pemungutan pajak ekspor-impor. Kegiatan perdagangan menjadi lebih terbuka setelah tahun 1850 dikeluarkan Undang-Undang Tarif merevisi perbedaan pajak impor. Penarikan pajak bagi pedagang Belanda dibebankan cukai 6%, sedangkan Inggris dan pedagang asing lainnya ditarik cukai 12% (Veth, 1856: 543-544).

Pada tahun 1857, pelayaran niaga Pontianak mendapat perhatian kolonial Belanda dengan menambah jalur pelayaran sekali sebulan yaitu jalur Batavia – Pontianak – Sambas (Polinggong, 2002: 164-165). Penambahan jalur pelayaran baru disebabkan meningkatnya perhatian pedagang Inggris di Kalimantan Barat.

Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda melalui *Cores de Vries* atau *Stoompaketvaart* membuka jalur pelayaran Makassar – Banjarmasin – Pontianak – Sambas setelah mendapat subsidi. Pada tahun 1860-1865 *Cores de Vries* membuka jalur barat Singapura – Batavia – Pontianak – Sambas, sedangkan jalur timur melalui Banda – Makassar – Banjarmasin – Surabaya – Semarang – Batavia – Pontianak – Sambas (Polinggong, 2002: 113,126).

Kegiatan perdagangan mengalami kemajuan setelah Inggris juga mendirikan perusahaan pelayaran berbendera Belanda, yaitu *Nederlandsch-Indische Stoomboot Maatschappij* (NISM). Perusahaan NISM disewa Pemerintah Hindia sejak tahun 1865 sampai 1890.

Jalur pelayaran Pontianak mengikuti jalur yang telah dilakukan *Cores de Vries* (Polinggong, 2002: 114-117). Kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan tanggal 15 Juli 1888 tentang pembentukan sebuah perusahaan angkutan negara. Pada 4 September 1888 dibuka perusahaan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* disingkat KPM (Polinggong, 2002: 121). Jalur pelayaran KPM tahun 1889-1894 masih mengikuti jalur pelayaran *Cores de Vries* dan NISM di Pontianak. Jalur pelayaran paling menarik perhatian KPM adalah pesatnya pelayaran Singapura dan Pontianak melalui pelayaran pribumi.

Faktor ini mendorong KPM mengambilalih jalur pelayaran tersebut. Kemudian dituangkan dalam kontrak tahun 1889, dan berlaku 1 Januari 1891. Jalur pelayaran Pontianak terdapat pada jalur No. 6 untuk pelayaran rute Batavia – Belitung – Pontianak dengan waktu pelayaran empat minggu sekali. Pada tanggal 17 Januari 1891 jalur tersebut baru diberlakukan dengan biaya f 8 (Campo, 1992: 74). Perluasan jalur pelayaran ke Singapura dibuka dengan rute pelayaran Batavia – Pontianak – Sambas – Singapura. Dibukanya jalur baru Singapura telah memberi potensi bagi kemajuan KPM yang bertujuan mempersempit gerak pelayaran pribumi dan swasta di Pontianak. Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin ke Singapura. Pontianak juga menjadi salah satu bandar bagi komoditas kayu besi, lada, intan, dan emas (Campo, 1992: 645).

KPM kemudian mendapat keistimewaan dari Pemerintah Hindia Belanda, seperti memonopoli pengiriman barang-barang milik Pemerintah Hindia Belanda, pengiriman surat, dan perjalanan pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu KPM telah mendominasi pelayaran dengan menyinggahi 225 pelabuhan di Nusantara.

Meski KPM memiliki monopoli pelayaran di Nusantara, tetapi pelayaran yang dikuasai pedagang Bugis tetap menjadi saingan KPM. Beberapa kapal Bugis yang semula menguasai pelayaran niaga, secara perlahan mengangkut kopra secara estafet. Monopoli pengangkutan antarpulau yang dilakukan pedagang Bugis semakin kuat setelah munculnya perdagangan kopra (Asba, 2007: 134-135). Data ini menunjukkan bahwa armada pelayaran pedagang Bugis, masih bertahan bahkan mengalami perkembangan selama masuknya KPM. Kapal layar dapat beroperasi baik di jalur pelayaran KPM maupun di pelabuhan kecil yang sulit dijangkau KPM.

4. Perkembangan Komoditas Perdagangan

Perdagangan semakin dinamis setelah terlibatnya para pedagang Cina yang memiliki

hubungan dagang dengan kolonial Belanda dan pedagang Cina di Singapura. Paling utama adalah tersedianya berbagai komoditas yang dibutuhkan pasar domestik dan internasional mendorong terciptanya jaringan perdagangan yang lebih luas di Pontianak.

Kemajuan perdagangan di Pontianak didukung oleh faktor komoditas perdagangan yang menarik para pedagang untuk memasarkannya ke Singapura dan Jawa. Beberapa komoditas adalah emas dan intan, serta komoditas hutan dan pertanian yang diproduksi dari hulu, seperti lada (*Piper nigrum L*), kopra, kelapa (*Cocos nucifera*), rotan (*sp. Daemonorops Draco*), tengkawang (*Shorea spp*), sarang burung, gambir (*Uncaria gambir Roxb.*), pinang (*Areca catechu*), lilin, getah perca, dan sagu (*Metroxylon sago Rottb*).

Selain komoditas perdagangan dari Pontianak, terdapat juga komoditas dari luar dipasarkan di Pontianak utamanya sutera dan guci dari Cina. Komoditas lainnya dari Cina adalah manik-manik, besi, dan panci-panci dari tembaga. Kesemuanya termasuk barang mewah dan salah satunya adalah guci warna hijau dengan tinggi 18 inchi dan mempunyai hiasan-hiasan naga Cina bernilai f 400 (Purcell, 1865: 21).

Komoditas perdagangan yang terdapat di Pontianak selain emas, intan dari Landak menjadi komoditas utama bagi pedagang asing dan pribumi ke Pontianak. Produksi intan sebagian besar dipasarkan ke Singapura, Jawa dan Madura. Pada tahun 1836-1848 produksi intan mengalami pasang surut. Salah satu faktor turunnya penghasilan intan adalah pergolakan kongsi-kongsi Cina, dan konflik antara orang-orang Cina dengan Melayu dan Dayak. Tahun 1836, jumlah ekspor intan sebesar 5.473 karat dengan nilai ekspor sebesar f 110.601. Tahun 1840 mengalami penurunan sebesar 3.484 karat dengan nilai ekspor f 92.552. Tahun 1844 mengalami penurunan sebesar 3.980 karat dengan nilai ekspor f 80.875. Tahun 1848 dengan nilai ekspor f 67.200 (Veth, 1856: 75).

Komoditas gula sebagai bahan baku dari tanaman tebu juga diminati pedagang. Tingginya permintaan gula menarik perhatian kolonial Belanda membangun pabrik-pabrik

gula. Pada 6 Juni 1837, terdapat kerja sama pembangunan pabrik gula antara kolonial Belanda dengan Sultan Pontianak diwakili Pangeran Bendahara melalui Notaris Crouse. Pabrik gula dinamakan "Pengharapan" dan letaknya berada di tepian Sungai Kapuas. Pengelolaan bahan baku dari tebu di bawah pengawasan Residen Pontianak dan Pangeran Bendahara. (Veth, 1856: 555). Pembangunan pabrik gula membawa dampak positif bagi terciptanya kesempatan kerja bagi penduduk seperti pengangkutan, penebangan tebu, dan berbagai pekerjaan pabrik.

Kelapa (*Cocos nucifera*) adalah salah satu komoditas ekspor utama Pontianak. Pada tahun 1850, kelapa pertama kali diperkenalkan orang-orang Bugis di daerah pesisir Pontianak, khususnya di sekitar Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat sampai Peniti. Orang Bugis banyak mendapat keuntungan dari usaha kelapa. Selain orang Bugis, perkebunan kelapa juga dikelola oleh orang Arab dan Melayu. Kelapa diolah menjadi minyak kelapa dan diekspor ke Jawa. Tahun 1870, orang Cina mulai menaruh perhatian dan saingan bagi orang Bugis sebagai pedagang eceran. Pada tahun 1873, minyak kelapa diekspor ke Singapura, dan tahun 1876 Singapura menjadi tujuan utama pemasaran. Beberapa tahun kemudian minyak bumi menggantikan minyak kelapa yang dipergunakan untuk lampu, sehingga kelapa diekspor dalam bentuk kopra dan diproses menjadi minyak kelapa di Singapura. Pada tahun 1889, proses kopra ke minyak kelapa beralih ke Pontianak setelah dibangun dua pabrik minyak kelapa di Pontianak (Heidhues, 2008: 158-159).

Tahun 1891, tanaman kelapa di Pontianak berjumlah 97.898 pohon. Banyaknya usaha budidaya kelapa menjadikan daerah Kalimantan Barat sebagai pengeksport kopra terbesar kedua setelah Makassar. Pemasaran kopra umumnya dikuasai para pedagang Cina, dan seringkali pengusaha Cina dari Singapura memborong kopra melalui pedagang Cina di Pontianak. Kopra yang telah dikumpulkan di gudang-gudang pelabuhan Pontianak, kemudian dikirim ke Singapura dan Jawa (Asba, 2007: 51).

Eksport kopra tahun 1900 berjumlah 4.339 ton, dan meningkat tajam tahun 1910 sebesar 23.125 ton. Pada tahun 1920 mengalami peningkatan sebesar 31.464 ton, dan tahun 1930 terjadi peningkatan ekspor cukup signifikan sebesar 71.726 ton. Peningkatan ekspor kopra disebabkan penduduk mulai membuka lahan baru untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa. Ekspor kopra mencapai puncaknya pada tahun 1939 sebesar 90.610 ton. Tingginya produksi kopra menarik pedagang Cina dan Melayu mendirikan industri minyak kelapa (Bohn, 1986: 57).

Pedagang Cina menaruh perhatian terhadap komoditas kelapa setelah membeli kebun-kebun kecil milik orang Bugis. Perkebunan kelapa orang Cina terbesar di Pontianak, Siantan, dan pesisir pantai Pontianak. Kemudian dikembangkan dan menjadi produsen terbesar di daerah pesisir utara Pontianak. Tahun 1915, orang Cina berhasil mengambil alih posisi orang Bugis sebagai penghasil kelapa terbesar di seluruh Kalimantan Barat (Heidhues, 2008: 160). Pemasaran kopra dijual secara bebas, namun untuk ekspor ditangani oleh *Coprafonds* agar dapat memenuhi kepentingan penghasil kopra dalam pemasaran ke luar Pontianak (Harmsen, 1947: 28).

Komoditas lada (*Piper nigrum L*) merupakan komoditas utama bagi petani Cina. Perkebunan lada mengalami peningkatan tahun 1880-an di Pontianak, Monterado, Landak, dan di perbukitan Sambas, terutama di dekat Bengkayang. Petani Cina lebih berpengalaman dalam mengembangkan tanaman lada dibandingkan dengan petani lainnya. Tahun 1892, jenis lada putih yang mempunyai nilai harga lebih tinggi mulai dibudidayakan. Kalimantan Barat menjadi pengeksport terbesar kedua lada putih setelah Bangka Belitung (Heidhues, 2008: 161).

Eksport lada dalam tahun 1900 tercatat 38 ton, dan tahun 1910 sebesar 856 ton. Bahkan ekspor lada mencapai puncaknya tahun 1920 sebesar 1.913 ton. Namun, setelah tahun 1930 mengalami

penurunan ekspor sejumlah 1.188 ton, dan tahun 1940 sebesar 665 ton (Bohn, 1986: 31). Penurunan ekspor lada disebabkan banyak petani lada cenderung mengalihkan usahanya dalam penanaman karet. Bahkan pada tahun 1935, harga lada di pasar dunia anjlok, sehingga petani lada beralih pada komoditas karet menguntungkan karena harganya semakin mahal.

Komoditas karet (*Hevea basiliensis*) mengambil alih peran utama ekspor kelapa. Pada tahun 1907, mulai diusahakan penanaman bibit tanaman karet di Kalimantan Barat. Mulai tahun 1910-an sebagian besar lahan digunakan untuk perkebunan karet. Pada tahun 1920-an, pedagang Cina mengambil bagian dalam usaha budidaya perkebunan karet. Hasil produksi karet mencapai puncaknya pada akhir tahun 1930 (Heidhues, 2008: 163).

Komoditas karet merupakan tanaman ekspor penting di Kalimantan Barat, pada tahun 1927 nilai ekspor karet mencapai f 30 juta (Asba, 2007: 53). Tahun 1937 jumlah nilai ekspor sebesar f 41 juta dengan produksi 70 persen dari karet, dan 22 persen dari kopra. Pada tahun 1936, jumlah ekspor karet secara keseluruhan di Nusantara mencapai 330.000 ton, di mana 70.000 ton diekspor dari Kalimantan Barat (Bohn, 1986: 30). Pada tahun 1939 jumlah ekspor karet mengalami penurunan sebesar 37.418 ton, akibat timbulnya krisis ekonomi.

Tanaman karet diusahakan orang Melayu dan Cina di tepi pantai dan sungai. Pengangkutan produksi karet di daerah *hinterland* sebagai penghasil karet di sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Landak menuju pelabuhan Pontianak. Usaha pengangkutan karet sebagian besar diangkut oleh kapal Nirub dan Pontianak *Riviervoer*. Perdagangan karet di Pontianak dijual secara bebas, tetapi untuk pemasaran ke luar negeri dimonopoli oleh maskapai N.I *Rubberfonds* (Harmsen, 1947: 27).

Kegiatan perekonomian Pontianak hampir secara keseluruhan dikuasai oleh pedagang Cina dengan membiayai dan

mengekspor komoditas perdagangan. Beberapa pedagang Cina yang mempunyai modal besar mengusahakan angkutan laut dan sungai, serta pengumpul hasil bumi dari pedagang perantara. Pedagang Cina yang modalnya kecil umumnya sebagai pedagang perantara di daerah pedalaman.

Pedagang Cina memegang peran penting dalam kemajuan perdagangan di Pontianak. Secara perlahan mereka mengambil alih peranan pedagang pribumi seperti Arab, Melayu, dan Bugis sebagai pedagang perantara di pedalaman. Tidak mengherankan mereka menguasai perdagangan maritim dan sungai, serta monopoli hasil bumi di pedalaman.

Bergesernya kegiatan ekonomi di kalangan pedagang Cina tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang memberi kesempatan dan keistimewaan perdagangan. Pedagang perantara Cina mengumpulkan lada, kopra, dan karet di pedalaman, dan membawanya ke Pontianak kemudian dipasarkan ke perusahaan-perusahaan dagang milik Pemerintah Hindia Belanda, seperti Perusahaan Borneo Sumatra (*Borsumij*) dan Perusahaan Jacobson Van den Berg & Co. Selain itu, beberapa komoditas juga dijual kepada pedagang Cina dari Singapura.

D. PENUTUP

Kegiatan perdagangan awalnya dikuasai oleh Sultan Pontianak melalui Pangeran Laksamana yang bertugas sebagai syahbandar dan penghubung kepentingan para pedagang, mengatur pajak masuk dan keluar pelabuhan, serta mengawasi pelayaran dan perdagangan. Munculnya persaingan dagang antara Belanda dan Inggris menyebabkan kolonial Hindia Belanda mengambil kebijakan monopoli perdagangan di Pontianak.

Setelah masuknya kekuasaan kolonial Hindia Belanda, kemudian menerapkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui berbagai perjanjian dengan Sultan Pontianak. Kesepakatan perjanjian menguntungkan kolonial Hindia Belanda dan segera

melakukan berbagai tindakan eksploitasi yang dapat mendatangkan berbagai keuntungan, baik berupa monopoli perdagangan, penyerahan wajib, maupun pajak pelabuhan dan ekspor-impor. Dampak dari perjanjian-perjanjian mengakibatkan kekuasaan Sultan Pontianak melalui sumber-sumber produksi beralih pada kolonial Hindia Belanda. Kebijakan kolonial Hindia Belanda memperlihatkan upaya membangun kekuasaan politik dan ekonominya.

Kolonial Hindia Belanda pada prinsipnya membatasi kekuasaan Sultan Pontianak pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan kepentingan politik dan perdagangan. Kebijakan perdagangan dikuasai terutama penghasilan pajak, bea dan cukai yang dipungut di pelabuhan, dan kebijakan monopoli perdagangan untuk menguasai Pontianak dari pengaruh Inggris.

DAFTAR SUMBER

1. ANRI

Borneo-West No.16/26, tanggal 5 Juli 1779.

Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, tanggal 18 Nopember 1820 Nomor 19.

2. Arsip yang Diterbitkan

Kartodirdjo, Sartono *et al.* 1971.

Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837). Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 4. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono *et al.* 1973.

Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Besluit 18 Nopember 1820, No.19

3. Buku

Alqadrie, Syarif Ibrahim *et al.* 1984.

Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Asba, A. Rasyid. 2007.

Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bohn, A.H. 1986.

West Borneo 1940-Kalimantan Barat 1950. Tilburg: Drukkerij Uitgeverij H. Gianotten B.V.

Cabaton, Antonie. 2015.

Jawa, Sumatra & Kepulauan Lain di Hindia Belanda. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Campo, J.N.F.M. A. 1992.

Koninklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1889-1914. Hilversum: Verloren.

Dick, Howard W. 1988.

"Perdagangan Antar Pulau, Pengintegrasian Ekonomi dan Timbulnya Suatu Perekonomian Nasional", Anne Booth *et al.* (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 399-434.

Frederick, William H. & Soeri Soeroto (eds). 1984.

Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.

Gallop, Annabel Teh *et al.* 1991.

Surat Emas Raja-Raja Nusantara. Jakarta: Yayasan Lontar kerjasama London: British Library.

Gottshalk, Louis. 1986.

Mengerti Sejarah. Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press.

Harmsen, H.J. West-Borneo Kalimantan Barat 12 Mei 1947.

Uitgave West-Borneo Raad en R.V.D Pontianak. West- Borneo: Drukkerij.

Heidhues, Mary Somers. 2008.

Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat. Jakarta: Yayasan Nabil.

Kartodirdjo, Sartono. 1984.

Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Kartodirdjo, Sartono. 1993.
Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500- 1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014.
Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. 1995.
Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng.
- Lapian, Adrian B. 2011.
Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lapian, Adrian B. 2012.
"Hindia Belanda: Pembentukan Wilayah dan Perbatasannya", *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm. 7-41.
- Lontaan, J.U. 1975.
Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat. Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.
- Mu'jizah. 2009.
Illuminasi Dalam Surat-Surat Melayu Abad Ke-18 dan Ke-19. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama École française d' Extrême-Orient, Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, KITLV-Jakarta.
- Poelinggomang, Edward L. 2002.
Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI, dan The Ford Foundation.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984.
Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purcell, Victor. 1865.
The Chinese in Southeast Asia. London: Oxford University Press.
- Rahman, Ansar. 2000.
Syarif Abdurrahman Alqadrie Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Ricklefs, M.C. 2009.
Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- Sulistiyono, Tri Sulistiyono. 2012.
"Dinamika Kemaritiman Dan Integrasi Negara Kolonial", *Indonesia dalam Arus Sejarah, Kolonisasi dan Perlawanan*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hlm. 87-125.
- Veth, P.J. 1854.
Borneo's Wester Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, voor atgegaan door een algemene schets des gangsche eilands. I. Zaltbommel: Joh. Nomanen Zoon.
- Veth, P.J. 1856.
Borneo's Wester Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, voorafgegaan door een algemene schets des gangschen eilands. II. Zaltbommel: Joh. Nomanen Zoon.
- Veth, P.J. 1871.
"Verslag Over De Residentie Borneo's Westkust 1827-1829", *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* (TNI).
- Vleming, J.L. 1926.
Het Chineesche Zakenleven in Nederland Indie. Weltevreden: Landsdukkerij.

4. Majalah

Panji Pustaka.

"Nomor Soeltan Pontianak", No. 15 Tahun IV, 23 Februari 1926.